

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP). Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Hingga saat ini, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara untuk mewujudkan kemandirian ekonomi serta kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pada saat ini, sektor perpajakan memegang peran penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan

- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan jenis Pajak Daerah di atas, yang menjadi pembahasan adalah Pajak Hiburan sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Hiburan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Jumlah wajib pajak hiburan setiap tahun bertambah maka secara teoritis akan bertambah pula jumlah penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah yang dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2013	209 WP	1.894.399.257.912
2014	245 WP	2.427.647.860.148
2015	280 WP	2.738.899.424.556
2016	317 WP	3.000.347.144.401
2017	359 WP	3.595.670.492.734

Sumber: Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hiburan, 2018

Perkembangan jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya setiap tahun menunjukkan peningkatan dalam kuantitas wajib pajak hiburan, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di Kota Surabaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mempunyai peranan besar dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan. Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah tentunya mendapat permasalahan. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Hiburan ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi akan meningkatkan penerimaan daerah. Banyaknya tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam mengelola Pajak Hiburan ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, karena itu penulis perlu mengetahui lebih dalam mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam mengelola Pajak Hiburan di Kota Surabaya. Hal inilah yang menjadikan penulis untuk membahas permasalahan ke dalam suatu Laporan Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK HIBURAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

- 1.2.1 Untuk meningkatkan pengetahuan penulis dibidang perpajakan terutama dibidang Pengenaan dan Penghitungan Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
- 1.2.2 Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam pengenaan dan penghitungan Pajak Hiburan.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1.3.1 Bagi Dinas Pendapatan Kota Surabaya

1. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dengan lembaga pendidikan khususnya Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan.
2. Dilaksanakannya Praktik Studi Lapang bagi mahasiswa dituntut terhadap instansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Instansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

1.3.2 Bagi Mahasiswa

1. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari seperti permasalahan yang timbul selama melaksanakan Praktik Studi Lapang.

2. Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan dan memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya dibidang perpajakan.
3. Guna menjadikan mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan pekerjaan secara efesien dan efektif melalui Praktik Studi Lapang.
4. Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya.

1.3.3 Bagi Pembaca

1. Dapat memberikan informasi dan sumbangan penelitian yang bermanfaat sebagai bahan referensi
2. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca yang akan penelitian.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Dalam laporan ini, membatasi ruang lingkup penelitian pada permasalahan yang mencakup pada sistem perpajakan yaitu pada sektor Pajak Hiburan, mekanisme pengenaan dan penghitungan Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya

1.5 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1.5.1 Teknik Observasi

Kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati secara teliti dan sistematis atas obyek yang diteliti.

1.5.2 Teknik Wawancara

Percakapan yang dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diajukan dalam laporan ini.

1.5.3 Teknik dokumentasi

Pengolahan data dengan cara meminta data dari laporan dan catatan milik Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang erat hubungannya dengan penyusunan laporan ini.

